

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Sehingga barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>1</sup> Dengan kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat adanya keterbukaan dan perdagangan bebas, dan untuk itu bangsa Indonesia dituntut untuk dapat memiliki daya saing yang kuat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Sebagaimana diketahui, dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku usaha. Dalam perkembangannya interaksi antara pelaku usaha dan konsumen ini tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus, banyak kendala yang datang dan justru memperburuk hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Ketidakharmonisan ini kerap kali justru berawal datang dari konsumen karena konsumen merupakan pemakai jasa atau barang.

Konsumen kerap menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, tidak mudah untuk mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Masalah tersebut sebenarnya bukan masalah baru. Banyak tindakan dari pelaku usaha yang merugikan konsumen seperti tidak memberikan informasi yang benar kepada konsumen terkait dengan produknya, sehingga hak konsumen atas adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dan keselamatan suatu produk boleh dikatakan belum berfungsi. Dengan harga mahal sekalipun bukanlah suatu jaminan bahwa barang tersebut bebas atau terhindar dari risiko yang ada.

Produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kian berkembang. Pada era modern saat ini kosmetik merupakan kebutuhan

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bagian ke I Umum, hlm. 34.

harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum perempuan yang ingin tampil cantik dan menarik di muka umum, selain itu kosmetik juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang, sehingga tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Keadaan seperti ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada konsumen. Kebanyakan konsumen wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM.

Menurut BPOM walaupun perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Dalam rangka pengawasan keamanan, dan mutu kosmetik yang beredar di Indonesia, selama tahun 2014 BPOM telah melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium dan pemeriksaan 6.372 sarana distribusi kosmetika.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 2.104 sarana distributor atau pelaku usaha kosmetik telah melakukan pelanggaran, antara lain karena<sup>4</sup> :

1. 150 sarana distribusi kosmetik menjual kosmetik mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk kosmetika.
2. 1.876 sarana distribusi kosmetik tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar (termasuk kosmetik palsu).
3. 78 sarana distribusi kosmetika menjual kosmetik rusak/kadaluarsa.

Temuan BPOM tersebut diatas, menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu diproduksi kosmetik ilegal (yang tidak memiliki izin edar) yang berbahaya. Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa masih banyak pelaku usaha yang melanggar atau menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah terkait pembuatan dan/atau penyediaan kosmetik yang beredar di Indonesia.

Kosmetik sangat dekat berhubungan dengan kesehatan, karena efek pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh terutama kulit. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik, yaitu tidak boleh menggunakan bahan berbahaya dan harus memiliki izin edar. Adapun pengaturan mengenai penyediaan dan/atau pengedaran kosmetik tidak boleh mengandung bahan berbahaya terdapat dalam Pasal 98 Undang-undang kesehatan yang menyatakan bahwa :

---

<sup>4</sup> BPOM, "laporan Tahunan BPOM tahun 2013" <<http://www.pom.go.id>> diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 20.12 WIB

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”

Terkait pengaturan tentang penyediaan dan/atau pengedaran kosmetik harus memiliki izin edar, tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kesehatan yang berbunyi :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan.

Penyediaan dan/atau pengedaran kosmetik tidak boleh menggunakan bahan berbahaya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika, menyatakan bahwa :

“Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Lebih lanjut Peraturan kepala BPOM mengatur mengenai pengertian kosmetik berbahaya yang dilarang beredar di Indonesia. Kosmetik berbahaya adalah kosmetik yang menggunakan campuran bahan yang diperbolehkan namun melebihi persyaratan mutu yang telah diakui atau sesuai dengan ketentuan undang-undang serta kosmetik yang menggunakan campuran bahan yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika karena tidak memenuhi syarat keamanan, dan kemanfaatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK 03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis bahan Kosmetika.

Menurut Sumiaty Haslinda kepala seksi pemeriksaan BPOM, pada kasus-kasus kosmetik ilegal yang berbahaya, zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetika diantaranya merkuri, *rhodamin b*, *hidrokinon* dan asam retinoat. Merkuri adalah logam berat yang berbahaya dan bersifat racun serta mengandung zat *karsinogenik* yang dapat menyebabkan kanker. *Rhodamin B*, yang sering disalahgunakan pada kosmetik sediaan tata rias (*eye shadow*, *lipstick*), merupakan pewarna kertas, tinta dan tekstil. Penggunaan pewarna ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan mengandung zat *karsinogenik* yang dapat menyebabkan kanker. *Hidrokinon* banyak disalahgunakan pada produk pencerah kulit. Penggunaan *hidrokinon* dapat menyebabkan iritasi kulit, membuat kulit menjadi merah dan terasa terbakar. Asam retinoat biasanya ditemukan pada kosmetik berbahaya untuk *peeling* (pengelupas kulit), dalam penggunaannya dapat menyebabkan rasa terbakar dan kerusakan pada kulit.<sup>6</sup>

Bagi pelaku usaha yang menyediakan dan mengedarkan dan tidak memiliki izin edar sebagaimana melanggar ketentuan Undang-undang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) akan dilakukan beberapa upaya yaitu melalui jalur *Non Pro Justitia* dan *Pro justitia* yang dilakukan oleh BPOM selaku PPNS untuk memberikan peringatan, maupun sanksi administratif kepada pelaku usaha yang diduga telah memproduksi kosmetik yang tidak sesuai dengan Undang-undang Kesehatan dan juga

---

<sup>6</sup> BPOM “*Dampak Penggunaan Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya*”  
<<http://www.pom.go.id>> diakses pada tanggal 16 Februari pukul 09.36 WIB

beberapa upaya yang dilakukan pemerintah melalui BPOM, Polri, serta instansi terkait untuk mengurangi peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya dengan cara membawa kasus-kasus tersebut ke muka pengadilan.<sup>7</sup>

Apabila pelaku usaha yang terbukti menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang diproses ke pengadilan maka akan dikenakan ketentuan pidana. Undang-undang Kesehatan mengatur ketentuan pidana tercantum dalam pasal 196 dan pasal 197. Adapun ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

#### Pasal 196 Undang-undang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

#### Pasal 197 Undang-undang Kesehatan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Salah satu kasus kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yaitu kasus Afrizal. Afrizal telah memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal yang berbahaya kurang lebih dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 BPOM melakukan pemeriksaan terhadap toko milik Afrizal. Dari hasil

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Komang Andaru P., S.H. selaku Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan BPOM Bandung pada tanggal 25 April 2017 di kantor BPOM Bandung.

pemeriksaan tersebut diketahui kosmetik yang diedarkan oleh Afrizal mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri (Hg). Tahun 2014 Pengadilan Negeri Bandung memutus Afrizal dengan pidana 6 bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Kesehatan tidak diatur mengenai perlindungan hukum bagi korban yakni konsumen kasus kosmetik ilegal yang berbahaya. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang Kesehatan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur khusus masalah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, bagi konsumen yang mengalami kerugian masih menggunakan ketentuan UUPK untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Dengan adanya UUPK diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen yang mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha itu sendiri. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen yang rendah. Oleh karena itu, UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen terutama pada kasus kosmetik ilegal yang berbahaya.

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 639/Pid.B/2014/PN.Bdg.



Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya tidak hanya melanggar ketentuan Undang-undang Kesehatan saja melainkan melanggar pula ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa.

Adanya kasus kosmetik ilegal yang berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 UUPK. Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Inti dari pasal tersebut adalah pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan menyatakan bahwa pelaku usaha harus memuat dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Tujuan diaturnya kewajiban pelaku usaha adalah untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan berdasarkan ketentuan standar mutu yang telah ditentukan undang-undang.<sup>9</sup>

Pasal 4 UUPK memberikan hak kepada konsumen, bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.<sup>10</sup> Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih

---

<sup>9</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 235.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2000, hlm. 29.

membahayakan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Terhadap hal yang ditimbulkan oleh itikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah ada ketentuan administratif, sanksi perdata, bahkan memberikan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad tidak baik tersebut.<sup>11</sup>

Selain pelaku usaha yang dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan, pelaku usaha harus dipertanggungjawabkan secara pidana untuk menimbulkan efek jera sehingga pelaku usaha dapat lebih memperhatikan produk yang diperdagangkannya. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana yang terjadi terhadap konsumen selain merugikan konsumen juga dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi karena ada kepentingan ekonomi didalamnya yang hendak dilindungi, agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau.

Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL KOSMETIK ILEGAL YANG BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi delik terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 639/Pid.B/2014/PN.BDG ?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya di pasaran ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kualifikasi delik terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 639/Pid.B/2014/PN.BDG.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi

dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya di pasaran.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, lembaga konsumen, pelaku usaha dan konsumen atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pelaku usaha dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian Hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama.

Penegakan hukum kasus kosmetik ilegal yang berbahaya terjadi semenjak dikeluarkannya Undang-undang Kesehatan. Kasus kosmetik ilegal yang berbahaya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Penjelasan Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kesehatan. Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana dalam Undang-undang Kesehatan adalah :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan.

Penegakan hukum kasus kosmetik ilegal yang berbahaya harus dilakukan untuk mencapai asas dan tujuan sebagaimana disebutkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Kesehatan, yaitu :

Pasal 3 :

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”

Asas Hukum Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Hukum Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yaitu:

1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa;
2. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;

3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
4. Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual;
6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan yang disebut sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Proses penegakan hukum akan berkaitan pula pada perlindungan hukum bagi korban terutama dalam hal ini yaitu konsumen kasus kosmetik ilegal yang berbahaya. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen juga perlindungan konsumen ini adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut mulai melakukan proses pemilihan

serangkaian atau sejumlah barang yang disini adalah kosmetik selanjutnya memutuskan untuk menggunakan kosmetik tersebut, hingga akibat yang terjadi setelah kosmetik tersebut dipergunakan oleh konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen berhubungan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, yang menyatakan:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Masalah konsumen merupakan masalah semua orang, dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang harus diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah.<sup>13</sup> Tujuan penyelenggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>14</sup>

Fungsi hukum berarti belum sangat berfungsi disini karena masih banyak produk kecantikan yang beredar ilegal atau tidak terdaftar di Balai

---

<sup>13</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 4.

<sup>14</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 18.



Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga banyak produk kecantikan yang tidak layak untuk di konsumsi oleh konsumen. Fungsi hukum sebagai *a Tool of Social Control* menurut Ronny Hantijo Soemitro<sup>15</sup> :

“Kontrol sosial, merupakan aspek normatif dari kehidupan social atau dapat disebut sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi.”

Dunia usaha pada era sekarang ini telah terkontaminasi oleh arus globalisasi yang menawarkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dan liberalis, neo liberal dan imperialisme modern.<sup>16</sup> Akibatnya, dunia usaha lebih banyak memusatkan perhatiannya pada upaya untuk meraih keuntungan semata-mata, tanpa melihat konsumen adalah sebagai mitra bisnis (*stake holder*) yang juga mempunyai hak untuk hidup layak dan sejahtera. Di sinilah pentingnya negara harus “campur tangan” untuk memproteksi hak-hak konsumen, yang dikenal sebagai perlindungan konsumen yang sejauh ini berada dalam posisi yang lemah.

Lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen juga disebabkan karena mulai dari proses sampai hasil produksi barang dan atau jasa yang dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun.<sup>17</sup>

Pengertian konsumen yang dimaksud pada Pasal 1 angka 2 UUPK adalah

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 71.

<sup>16</sup> Muhammad Yunus, *Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru Yang Memihak Kaum Miskin*, (Terjemahan Alex Tri Kantjono), Gramedia, Jakarta, 2011.

<sup>17</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2000, hlm. 37.

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Kemudian pengertian pelaku usaha yang dimaksud pada Pasal 1 angka 3

UUPK adalah

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Selanjutnya pengertian barang yang dimaksud pada Pasal 1 angka 4

UUPK adalah

“setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

Konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi kosmetik ilegal yang berbahaya dapat dikatakan telah menjadi korban akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak jujur dalam pembuatan barang dan/atau jasa. Berdasarkan hal tersebut, undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak-hak tersebut dilanggar akan berpotensi terjadinya kejahatan terhadap konsumen<sup>18</sup>. Hak-hak konsumen yakni tertuang dalam Pasal 4 UUPK, menyebutkan tentang hak-hak konsumen :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diinginkan;

---

<sup>18</sup> Didik M. ARif Masur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 25.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam prakteknya banyak konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur, nakal yang jika ditinjau dari aspek hukum merupakan tindak pelanggaran hukum. Akibatnya konsumen menerima barang dan atau jasa tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas dan harganya karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan juga masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik palsu yang berbahaya yang beredar di pasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan dan tertipu dalam memilih kosmetik tersebut.

Di sisi lain karena ketidak tahuan dan kurang sadaran konsumen akan hak-haknya maka konsumen menjadi korban pelaku usaha.<sup>19</sup>

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan konsumen, salah satunya:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Halim Barkatullah , *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: FH. Unlam Press, 2008), hlm. 5.

“beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;”

Selain kewajiban pelaku usaha, di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga diatur berbagai larangan bagi pelaku usaha sesuai Pasal 8<sup>25</sup>. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dibagi kedalam dua larangan pokok yaitu:

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Berbagai larangan bagi pelaku usaha sesuai Pasal 8 UUPK baik larangan mengenai kelayakan produk, berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi masyarakat luas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>21</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm. 42.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Tujuh pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27, yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha.
- b. Dua pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 yang mengatur mengenai pembuktian.
- c. Satu pasal, yaitu pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Harkristuti Harkrisnowo membedakan berbagai perilaku yang merugikan konsumen yaitu merupakan perbuatan melawan hukum (sebagai kasus perdata) dan tindak pidana. UUPK telah memberikan akses dan kemudahan bagi hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan sejumlah tuntutan yang menyangkut kepentingan konsumen dengan dirumuskan sistem pertanggungjawaban produk oleh pelaku usaha (*product liability*).<sup>22</sup> Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya : Pelanggaran jaminan, kelalaian dan tanggung jawab mutlak.

UUPK menyertakan tanggung jawab produk dalam pasal 7 sampai pasal 11 (*product liability*) adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau

---

<sup>22</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “*Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia*”.(Jakarta: Lokakarya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan konsumen, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan 1996), hlm. 6.

dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual dan mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.<sup>23</sup>

Perlindungan Konsumen menganut beberapa asas, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu

1. Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

---

<sup>23</sup> Ansorulloh Najmuddin, *Dilema Perundang-undangan di Indonesia*, <http://indoprogress.blogspot.com>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 18:36 WIB.

perlindungan konsumen, serta negara menjamin adanya kepastian hukum.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktifitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak jurist menyebut sebagai tujuan hukum.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu cara menanggulangi kejahatan yang dilakukan pelaku usaha, dengan diterapkannya hukum pidana terhadap pelaku usaha diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha, sehingga dapat mengurangi tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Penerapan hukum pidana sendiri tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, suatu konsep dasar atau “*basic concept*” dari suatu sistem tertentu adalah merupakan pokok-pokok pikiran mengenai pengertian, asas, sistematika dan struktur yang berlaku menurut sistem hukum tertentu.<sup>25</sup> Uraian tentang konsep dasar hukum pidana akan meliputi uraian tentang:<sup>26</sup>

1. Unsur-unsur suatu tindak pidana (*element of crimes*).
2. Klasifikasi tindak pidana.

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Op.cit.*, hlm. 95-96.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 55.

3. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)
4. Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana (*criminal defenses*).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang beliau definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wedderrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diberikan sanksi agar tertib hukum dapat terpelihara. Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum maka perbuatan yang dilakukannya harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, baik itu berupa kesalahan maupun kealpaan.

Lebih lanjut Simons<sup>29</sup> mengatakan sifat yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang,

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 71.

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education & Pu-KAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 186.



hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>30</sup>

Berdasarkan rumusan delik diatas pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal berbahaya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena telah diatur dalam Ketentuan pidana. Menurut Fletcher, teori kesalahan normative menyebabkan *“if” ‘guilty’ is synonymous with being ‘found liable under the law’, then it would be analytically true that the states punishes only the guilty*”. Dengan demikian, jika kesalahan adalah dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum maka setiap pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika pada waktu melakukan tindak pidana terdapat kesalahan pada diri pembuat<sup>31</sup>.

Maka konsekuensi hukum dari pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah

---

<sup>30</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui pendekatan Restoratif Suatu terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 47.

<sup>31</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 86.

dibuat dengan sengaja tersebut dapat dijerat beberapa pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

- a. Pasal 196 yang mengatur mengenai persyaratan standar keamanan, khasiat, keamanan, dan mutu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Pasal 196 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

- b. Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) yang mengatur mengenai izin edar sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Pasal 197 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

- c. Pasal 198 Jo. Pasal 108 atau pasal 98 ayat (2) yang mengatur mengenai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Pasal 198 :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang merugikan konsumen atau melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat

dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 UUPK.

Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 60 UUPK. Sanksi administratif ini merupakan suatu hak khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ditetapkan juga sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Sanksi pidana yang diatur terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang bunyinya sebagai berikut :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Selain sanksi pidana pokok, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang sanksi pidana tambahan, yakni dalam Pasal 63 yang bunyinya sebagai berikut :

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi penelitian**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan :<sup>32</sup>

“Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”

Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 97.

penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk kemudian di analisis.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode dengan cara pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisa undang-undang yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :<sup>33</sup>

“Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek .”

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan ditunjang oleh studi lapangan mengenai permasalahan yang terjadi di dalam dunia bisnis pelaku usaha berkenaan dengan masalah kegiatan produksi dan penjualan kosmetik ilegal yang berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 97.

yakni penelitian terhadap asas manfaat, asas adil dan merata, dan asas perikehidupan dalam keseimbangan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni penelitian terhadap asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan terhadap pedoman perilaku pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

### 3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridis-normatif, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan data kepustakaan dan diperoleh dari data sekunder. Dimulai dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

#### 1) Bahan hukum primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan :<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

“Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.”

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-4.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat kesehatan, kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika.
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik.

10. Keputusan badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

11. Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 639/Pid.B/2014/PN.Bdg.

## 2) Bahan hukum sekunder

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>35</sup>

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.”

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, Hasil seminar, dan lain-lain.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, artikel mengenai konsumen dan pelaku usaha, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, bibliografi, penelusuran bahan di internet (*virtual research*) mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dan peredaran kosmetik ilegal berbahaya, dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.52.



#### b. Penelitian Lapangan

Soerjono Soekanto menyatakan:<sup>36</sup>

“Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)”

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada pihak yang lebih berkompeten, dan dilakukan kepada instansi-instansi terkait permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Penelitian Kepustakaan

1) Menginventarisir peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal yang berbahaya dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen.

2) Studi Dokumen

Menurut Soerjono Soekanto:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 228.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 66.

“Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*”

Dalam penelitian ini ditelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, artikel mengenai konsumen dan pelaku usaha, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, bibliografi, penelusuran bahan di internet (*virtual research*) mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dan peredaran kosmetik ilegal berbahaya, dan lain-lain.

- 3) Menganalisis apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, serta sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi hukum.

#### b. Penelitian Lapangan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :<sup>38</sup>

“Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (interview) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan intervier”

Studi lapangan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan berbagai pihak yaitu kepada Bagian Penyidik obat dan makanan Balai Besar POM di Bandung, dan kepada Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kota Bandung yang dilakukan secara langsung.

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm.71-73.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan hukum. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

### a. Penelitian kepustakaan

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa alat tulis seperti pulpen, *flashdisk* dan buku catatan untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan.

### b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer dengan mengadakan wawancara dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpul data terhadap penelitian lapangan ini berupa pedoman wawancara, kamera, dan alat perekam (*tape recorder*), atau alat penyimpanan.

## 6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto :<sup>39</sup>

“Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.”

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 228.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta menggali nilai hukum yang hidup dimasyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil peneltian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain:

### a. Studi Pustaka

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi, Bandung;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Balai Besar POM di Bandung, Jalan Pasteur No. 25 Bandung, Jawa Barat – 40171.
- 2) Pengadilan Negeri bandung, Jalan LL. RE. Martadinata No. 74-80, Kota Bandung.

### 8. Rencana Jadwal Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan berbagai kegiatan yang diawali dengan pencarian judul dan setelah judul disetujui, peneliti mencari bahan penulisan dengan jadwal kegiatan yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	2016	2017				
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Persiapan Judul & Acc Judul						
2	Persiapan Studi Kepustakaan						
3	Bimbingan UP, Koreksi, Revisi dan Acc untuk diseminarkan						
4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan data Bab I sampai Bab V, Bimbingan dan Acc						
7	Sidang Komprehensif						
8	Perbaikan, Perjilidan dan Pengesahan						



